

**PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT  
TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK BADAN  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
SEMARANG TENGAH SATU**

*(The Influence of Tax Collection With Forced warning letter Letter  
of Compliance and Taxpayers Tax Service Agency in the Office of  
the Central Semarang Pratama)*

**Richa Wahyu Arumi \*)  
Yulianti \*)**

**Abstract**

The Purpose of this research to examine taxpayer compliance. Model of taxpayer compliance is tested with tax collection with a letter of reprimand and forced letter. Specifically, this research examines, (1) the effect of the tax collection compliance with the letter of reprimand against corporate taxpayers, (2) the effect of the tax collection forced letter to taxpayer compliance.

The variables used in this study is the collection of tax with a letter of reprimand, forced letter of tax collection and taxpayer compliance. The sample in this research is the Tax Office Primary Middle Semarang The period 2009 to 2013. Sampling method used in this study is purposive sampling method. The method of data analysis used in this study is quantitative method consisting of classical assumption test, multiple linear regression analysis, the coefficient of determination and hypothesis test that using the t test.

The results of quantitative analysis using the t test is known that the variable tax collection with a letter of reprimand and a significant positive effect on tax compliance by entities 5,221 > t table of values with a significant value of 0,000, the tax collection forced letter positive and significant effect of 2,380 > of value t table with a significant value of 0,021.

**Keywords:** *Letter of reprimand, letters of forced, taxpayer compliance*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak badan. Model kepatuhan wajib pajak badan yang diuji adalah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Secara spesifik penelitian ini menguji, (1) pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran terhadap kepatuhan wajib pajak badan, (2) pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat teguran, penagihan pajak dengan surat paksa, dan kepatuhan wajib pajak badan. Sampel dalam penelitian

\*) *Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*

ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu periode 2009 sampai dengan 2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang terdiri dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis yang menggunakan uji t.

Hasil dari analisis kuantitatif menggunakan uji t diketahui bahwa variabel penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan sebesar  $5,221 >$  dari nilai t tabel dengan nilai signifikan 0,000, penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan sebesar  $2,380 >$  dari nilai t tabel dengan nilai signifikan 0,021.

**Kata Kunci:** *Surat teguran, surat paksa, kepatuhan wajib pajak badan*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat (Waluyo, 2011:1). Dalam Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011:23). Sehingga pajak perlu terus ditingkatkan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Salah satu sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Dari sistem tersebut yang paling esensial yaitu adanya kewajiban Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak serta penegakan hukumnya. Sebagai unsur penegakan hukum ini, dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak (Waluyo, 2011:57).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu menciptakan perhatian. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Akibat dari kendala itu mengakibatkan tunggakan pajak yang terus meningkat hingga saat ini. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi bangsa Indonesia yang memang sedang melakukan pembangunan nasional. Maka pemerintah memberlakukan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 (Pandapotan, 2012).

Penagihan termasuk kegiatan *extra effort* yang diyakini mampu memberikan sumbangan pemasukan bagi Kas Negara. Dalam mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak, data tunggakan pajak yang akurat sangat diperlukan. Selain itu, penyempurnaan peraturan dan kebijakan di

bidang penagihan juga harus terus dilakukan. Seiring dengan pelaksanaan penagihan pajak, peranan Jurusita Pajak harus selalu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Harapannya adalah untuk mendapatkan penagihan pajak yang efektif dan efisien. ([www.bppk.depkeu.go.id](http://www.bppk.depkeu.go.id))

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa**  
**Tahun 2009 s/d 2013**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Surat Teguran</b>	<b>Nilai Surat Teguran</b>	<b>Jumlah Surat Paksa</b>	<b>Nilai Surat Paksa</b>
2009	328	222.236.054	628	826.093.178
2010	507	18.483.522.464	300	13.420.755.061
2011	416	8.865.207.670	461	7.639.467.683
2012	457	12.913.659.025	234	12.767.566.910
2013	428	9.831.961.745	237	8.285.377.890

*Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Semarang Tengah Satu*

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan surat teguran pada tahun 2010 dan 2012 sebesar 507 lembar dan 457 lembar surat teguran yang diterbitkan. Sedangkan, penerbitan pada surat paksa terjadi penurunan dari tiap tahunnya kecuali pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 237 lembar.

Berdasarkan uraian di atas maka pembahasan lebih lanjut terhadap pengaruh penagihan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Dalam penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU”**.

## **2. Telaah Pustaka**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Penagihan Pajak**

Menurut buku Mardiasmo (2011:125) yang dimaksud dengan penagihan pajak yaitu: “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

#### **2.1.2 Surat Teguran**

Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diawali dengan Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis oleh pejabat yang berwenang atau kuasa

yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran (Cahyo, 2006).

Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis tidak diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya walaupun tanggal jatuh tempo pembayaran pajak telah terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya. Hal ini wajar saja karena wajib pajak tersebut akan menanggung beban tambahan berupa bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap keterlambatan pembayaran tersebut. Tetapi keterlambatan tersebut adalah atas sepengetahuan dan persetujuan fiskus sehingga terhadapnya tidak akan diberikan surat teguran, karena pada dasarnya wajib pajak tersebut memiliki kepatuhan membayar pajak tetapi tidak bisa segera melakukannya disebabkan kondisi keuangannya kurang baik. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka pejabat segera menerbitkan Surat Paksa (Cahyo, 2006).

### 2.1.3 Surat Paksa

Dalam buku leaflet Nomor: PJ.091/KUP/L/003/2013-00, Surat Paksa merupakan surat perintah kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar pajak terutang sekaligus dengan biaya penagihan pajaknya.

Surat Paksa harus memuat sekurang-kurangnya:

1. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
2. dasar penagihan;
3. besarnya utang pajak; dan
4. perintah untuk membayar.

Surat Paksa diterbitkan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal penagihan pajak yang dilakukan adalah penagihan pajak pusat, maka Menteri Keuangan yang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak pusat misalnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. Penerbitan Surat Paksa dilakukan saat:

- Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- Penanggung Pajak yang terhadapnya telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan pajak menurut Zain (2003:31) dalam Pandapotan (2012), yaitu kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat dari wajib Pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturanaturan yang berlaku (Pandapotan, 2012).

## 2.2 Hubungan Logis Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis

### 2.2.1 Hubungan Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 mengatur bahwa setelah lewat 7 hari jatuh tempo tunggakan pajak, tetapi Wajib Pajak belum melunasi utang pajak maka akan diterbitkan surat teguran. Ini bermaksud untuk mengingatkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan hanya bersifat persuasif karena belum ada sanksi hukum. Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan).

H1 : Penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

### 1.1.2 Hubungan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

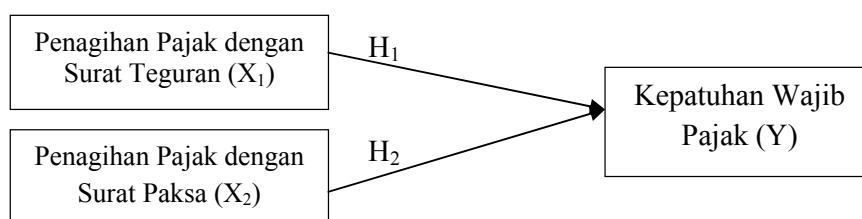
Tujuan diterbitkannya surat paksa sebagaimana pengertian yang dicantumkan dalam undang-undang adalah untuk menagih utang pajak. Setelah diterbitkannya surat paksa, diharapkan penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya. Jika kepada Wajib Pajak yang telah ditebitkan surat paksa belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan penyitaan. Biasanya Wajib Pajak akan merasa takut, sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Oleh karena itu, peneliti menduga ada pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dugaan ini didasarkan karena selama ini Direktorat Jenderal Pajak belum mampu membuat masyarakat patuh akan pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini. Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka penelitian ini dapat dituangkan dalam suatu skema. Berikut ini kerangka pemikiran yang dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Objek Penelitian, Populasi, dan Sampel**

##### **3.1.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memperoleh objek penelitian dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Objek penelitian ini adalah penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa.

##### **3.1.2 Populasi dan Penentuan Sampel**

Populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Uma Sekaran, 2009: 121). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang melaksanakan kewajiban di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

Sampel (*sample*) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Uma Sekaran, 2009: 123). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling purposive. Sampel dalam penelitian ini yaitu hanya wajib pajak badan yang pernah mendapatkan penagihan dengan surat teguran dan surat paksa. Sedangkan sampel data yang di pergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan seksi penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu dari tahun 2009 sampai dengan 2013.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data kuantitatif yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

##### **3.2.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang di dapat dari data penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dan dilunasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan data dokumenter (*documentary data*). Data penelitian ini berasal dari seksi Penagihan Pajak dan seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.

#### **3.4 Metode Analisis**

##### **3.4.1 Analisis Regresi Berganda**

Menurut Sugiyono (2011: 277), Analisis regresi ganda digunakan peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah :  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

a = Kostanta

b1 = Koefisien surat teguran

- b2 = Koefisien surat paksa
- X1 = Surat teguran
- X2 = Surat paksa

### 3.4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19).

### 3.4.3 Uji hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan uji t. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variable independen (X1 dan X2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Langkah –langkah yang dilakukan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

a. Menentukan Hipotesis

Ho :  $b < 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

Ha :  $b > 0$ , artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

b. Menentukan Tingkat Signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan alpha 5%. Signifikansi 5% atau 0,05 artinya penelitian ini menentukan risiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 95% (tingkat kepercayaan).

c. Kriteria Pengujian

Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel} > 0,05$  maka Ho ditolak (Ha diterima), artinya bahwa variabel X dengan variabel Y tidak mempunyai pengaruh positif signifikan.

Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel} < 0,05$  maka Ho ditolak (Ha diterima), artinya bahwa variabel X dengan variabel Y mempunyai pengaruh positif signifikan.

### 3.4.4 Uji Koefisien Determinasi

Dalam uji linear berganda, Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh serentak variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat untuk itu digunakan angka-angka pada tabel model *summary*. Cara menentukan Koefisien Determinasi dengan melihat kolom R2, hasil dari analisa data SPSS.

### 3.4.5 Uji Asumsi Klasik

#### 3.4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2011:160).

a. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang

mendeteksi distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011:161).

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan :

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/ atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistik bila sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov- Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2011:164):

H<sub>0</sub> : Data residual berdistribusi normal

H<sub>A</sub> : Data residual tidak berdistribusi normal

### 3.4.5.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011:105).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Multikolinieritas di dalam model regresi dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$ .

### 3.4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu y adalah y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (y prediksi –y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011):

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Analisis Data

#### 4.1.1 Statistik Diskriptif

Statistik diskriptif memberikan gambaran atau diskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum (Ghozali, 2011).

**Tabel 4.1**  
**Hasil Statistik Diskriptif Variabel Penelitian**  
**Descriptive Statistics**

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Surat Teguran	60	0	192	2136	35,60	39,569
Surat Paksa	60	0	163	1869	31,15	31,096
kepatuhan wajib pajak	60	1	42	867	14,45	9,229
Valid N (listwise)	60					

Sumber: Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19

Dari tabel 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa dari keseluruhan sampel yang diambil diketahui bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran diperoleh nilai minimum 0 dan nilai maksimum sebesar 192, serta rata-rata surat teguran sebesar 35,60 dengan nilai standar deviasi sebesar 39,569. Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diperoleh nilai minimum 0 dan nilai maksimum sebesar 163, serta rata-rata surat paksa sebesar 31,15 dengan nilai standar deviasi sebesar 31,096. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak badan terendah diperoleh nilai minimum 1 dan nilai maksimum sebesar 42, serta rata-rata kepatuhan wajib pajak badan sebesar 14,45 dengan nilai standar deviasi sebesar 9,229.

#### 4.1.2 Uji Asumsi Klasik

##### 4.1.2.1 Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas data dapat juga dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu (Ghozali,2011:32):

Hipotesis Nol ( $H_0$ ) : data terdistribusi secara normal

Hipotesis Alternatif ( $H_A$ ) : data tidak terdistribusi secara normal

**Tabel 4.2**  
**Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	7,26724200
Most Extreme Differences	Absolute	,123
	Positive	,123
	Negative	-,073
Kolmogorov-Smirnov Z		,956
Asymp. Sig. (2-tailed)		,321

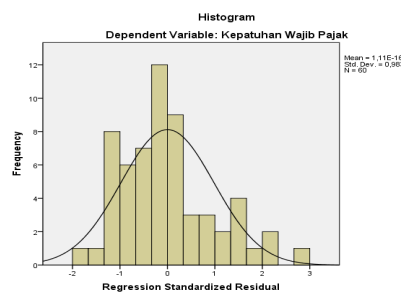
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19

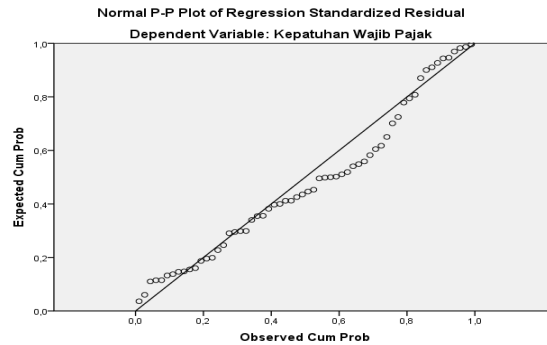
Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai K-S 0,956 dengan probabilitas signifikansi 0,321 dan nilainya jauh di atas  $\alpha=0.05$  hal ini berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terdistribusi secara normal.

**Gambar 4.1**  
**Grafik Histogram**



Sumber : Output SPSS 19

**Gambar 4.2**  
**Grafik Normal P-P Plot of Regression Standarized Residual**



Sumber : Output SPSS 19

Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

#### 4.1.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dengan membandingkan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Multikolonieritas terjadi jika nilai Tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10.

**Tabel 4.3**  
**Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Surat Teguran	,995	1,005
Surat Paksa	,995	1,005

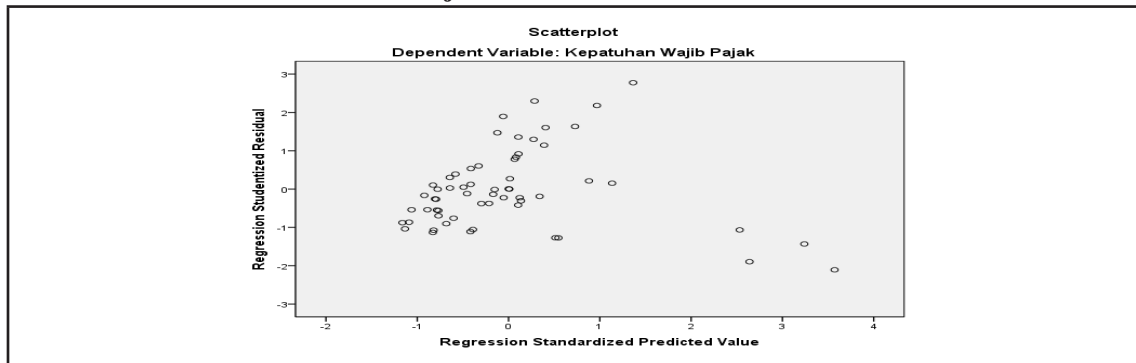
Sumber : Pengolahan Data dengan program SPSS 19

Hasil perhitungan surat teguran dan surat paksa pada tabel 4.3 menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari multikolonieritas atau dapat dipercaya dan obyektif.

#### 4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Scatter plot. Seperti pada gambar berikut ini :

**Gambar 4.3**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber : Output SPSS

Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan masukan variabel penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

#### 4.1.3 Analisis Regresi Berganda

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS 19.00*. Adapun analisa data adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Regresi**

		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	7,615	1,574		4,838	,000		
	Surat Teguran	,127	,024	,546	5,221	,000	,995	1,005
	Surat Paksa	,074	,031	,249	2,380	,021	,995	1,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19

Model persamaan regresi yang dapat dituliskan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,546 X_1 + 0,249 X_2$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penagihan pajak dengan Surat Teguran ( $X_1$ ) = 0,546 dengan signifikansi =0,000, hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya bila surat teguran naik sebesar 1 %, maka kepatuhan wajib pajak badan akan cenderung meningkat 0,546 %
2. Penagihan pajak dengan Surat Paksa ( $X_2$ ) = 0,249 dengan signifikansi =0,021, hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan artinya bila surat paksa naik 1%, maka kepatuhan wajib pajak badan akan cenderung meningkat 0,249%.

#### 4.1.4 Uji Hipotesis (Uji t)

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				Collinearity Statistics		
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
B	Std. Error	Beta						
1	(Constant)	7,615	1,574		4,838	,000		
	Surat Teguran	,127	,024	,546	5,221	,000	,995	1,005
	Surat Paksa	,074	,031	,249	2,380	,021	,995	1,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19

##### 4.1.4.1 Uji Hipotesis Pertama (H1)

#### Hipotesis 1: Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran memiliki nilai t hitung sebesar 5,221 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan (0,000) < (0,05), hal ini berarti variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran signifikan pada level 5 % dan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

##### 4.1.4.2 Uji Hipotesis Kedua (H2)

#### Hipotesis 2: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memiliki nilai t hitung sebesar 2,380 dan nilai signifikan sebesar 0,021. Nilai signifikan (0,021) < (0,05), hal ini berarti variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa signifikan pada level 5 % dan  $H_2$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

#### 4.1.5 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *R square*.

**Tabel 4.6**  
**Hasil Pengujian Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,616 <sup>a</sup>	,380	,358	7,394

a. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil pengolahan data dengan program SPSS 19

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat besar nilai *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,358 yang berarti variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 35,8 %. Hal ini berarti 35,8 % Kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sisanya 64,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dapat diketahui bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan menerbitkan surat teguran bagi wajib pajak yang masih tidak patuh dapat memberikan peringatan atau teguran untuk melunasi utang pajaknya.

### 4.2.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, dapat diketahui bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama ( $H_2$ ) diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan menerbitkan surat paksa bagi wajib pajak yang masih tidak patuh agar segera melunasi utang pajaknya dan membayar biaya penagihan pajak.

## 5. Simpulan, Saran dan Keterbatasan

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di awal dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
3. Pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0,358 yang berarti variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 35,8 %. Hal ini berarti 35,8 % Kepatuhan Wajib Pajak Badan dipengaruhi variabel Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Sisanya 64,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak diharapkan melakukan tindakan tegas terhadap Wajib Pajak yang tidak kooperatif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia.
2. Upaya peningkatan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajaknya hendaknya terus ditingkatkan melalui penyuluhan- penyuluhan pajak secara intensif.

## 5.3 Keterbatasan

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian berikutnya. Berikut ini keterbatasan penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu obyek saja, yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu. Dan sampel yang digunakan hanya wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu.
2. Data yang diolah hanya merupakan data sekunder, yaitu data jumlah surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan dan dilunasi yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu periode 2009 s/d 2013.
3. Data yang diolah hanya jumlah lembar surat diterbitkan kepada wajib pajak dengan jumlah surat yang direspon oleh wajib pajak, tanpa menganalisa berapa jumlah yang menjadi piutang atau tagihan dan banyaknya yang berhasil dilunasi jika yang diolah adalah jumlah Rupiah, kemungkinan hasil akan berbeda.
4. Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menghasilkan *Adjusted R Square* 35,8 %, masih ada 64,2 % faktor lain yang dapat menyempurnakan penelitian ini.

## 5.4 Agenda Penelitian Yang Akan Datang

Berdasarkan keterbatasan di atas, maka implikasi yang diberikan untuk penelitian berikutnya yaitu:

1. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan pengambilan obyek penelitian yang lebih banyak pada perusahaan yang melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan memperbanyak jumlah sampel atau menambah variabel independent lainnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk mencari literatur atau referensi tentang kriteria patuh wajib pajak sebagai pengakuan, sehingga jelas yang dikatakan patuh dan tidak patuh.

## Daftar Pustaka

- Aribowo, Irawan, 2013, *Bagaimana Strategi DJP Dalam Mengamankan Target Penerimaan Pajak 2013?*, <http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak/index.php/artikel/opini-kita-lain-lain/1430-bagaimana-strategi-djp-dalam-mengamankan-target-penerimaan-pajak-2013>, diakses: 19 Maret 2014.
- Direktorat Jenderal pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- \_\_\_\_\_, 2014, Leaflet Nomor: PJ.091/KUP/L/003/2013-00 “*Surat Paksa Penagihan Pajak*”, <http://www.pajak.go.id/content/leaflet-surat-paksa-penagihan-pajak>, diakses: 4 Maret 2014.
- Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan – Edisi Revisi 2011*, ANDI, Yogyakarta.
- Ritonga, Pandapotan, 2012, “*Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*”, Jurnal Ilmiah SAINTIKOM, Vol.11, No. 3, Hal: 215.
- Sekaran, Uma, 2007, *Research Methods For Business*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Bisnis*, ALFABETA, Bandung.
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Wicaksono, Cahyo, 2006, “*Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggal Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Satu Jakarta*”, Tesis Ilmu Administrasi, Perpustakaan Universitas Indonesia.